



Efektivitas Program Sembako di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

The Effectiveness of the Basic Food Programme in Selopamioro Village Imogiri Sub-District Bantul District

Berliana Rifka Annisa¹, Pandhu Yuanjaya²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 22-03-24

Diperbaiki 23-03-24

Disetujui 25-03-24

Kata Kunci:

Efektivitas, kemiskinan, Program Sembako

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program Sembako dan menganalisis faktor penghambat program Sembako di Kalurahan Selopamioro. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pelaksana Harian, Tenaga IT, dan Analis Komponen Data Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Imogiri, Tata Laksana Pemerintah Kalurahan Selopamioro, agen *e-waroeng*, dan Keluarga Penerima Manfaat program Sembako di Kalurahan Selopamioro. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data dengan menggabungkan data sekunder melalui studi pustaka, dokumen, arsip-arsip, dan gambar. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Sembako sesuai indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata yang ada di Kalurahan Selopamioro telah berjalan efektif. Faktor penghambat efektivitas program Sembako seperti halnya agen *e-waroeng* yang memiliki maksud terselubung memotong nilai bantuan tidak sesuai aturan, *monitoring* pembelanjaan yang kurang, kurangnya informasi dilapangan saat KPM mengalami masalah pencairan, dan pengaduan para agen serta para KPM yang tidak terespons secara cepat.

ABSTRACT

Keywords:

Effectiveness, poverty, Basic Food Programme

The purpose of this study is to assess the Basic Food Program's deterrents and evaluate its efficacy in the Selopamioro village. This research is a qualitative method research through three data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The Social Service of Bantul District's Daily Executive, IT Staff, and Data Component Analysts, as well as the Social Welfare Workers of Imogiri Sub-district, the Selopamioro Village Government Administration, electronics shop agents, and the Basic Food Program's Beneficiary Families, served as the study's informants. In order to verify the accuracy of the data, this study combines secondary data from literature reviews, documents, archives, and photos using source triangulation techniques. Data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing were the techniques used in data analysis. The study's findings show that the Basic Food Programme in the Selopamioro village has been operating successfully if use Sutrisnos's effectiveness indicators. Elements that undermine the Basic Food Program's efficacy, like electronics shop operatives with the covert goal of undermining the value of aid in violation of regulations. Next are the issues of inadequate spending oversight, a dearth of field information when KPM encounters difficulties with disbursement, particularly from senior KPM beneficiaries, and agent and KPM grievances that go unanswered.

1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi isu yang tidak asing disekitar kita. Kemiskinan adalah permasalahan global dan mendasar yang dialami oleh banyak negara. Adapun kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar didalam hidup manusia yang dapat menghambat kesejahteraan negara[1]. Kemiskinan menjadi permasalahan mendasar terhadap kesejahteraan sosial dalam hal menilai kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan budaya [2]. Sebab adanya kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar [3]. Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami persoalan kemiskinan kompleks dan berbeda disetiap wilayahnya. Kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengentasan kemiskinan selama ini berfokus pada pendekatan moneter. Kebijakan tersebut berupa stabilitas inflasi sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi makro Indonesia[4]. Namun, jika ditinjau lebih dalam, kemiskinan memiliki sifat multidimensi. Sifat ini merupakan sebuah kondisi kurangnya seluruh indikator kemiskinan yang ada[5]. Data kemiskinan nasional menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan Maret 2022 tercatat sebesar 9,54 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sampai dengan bulan September 2022 yaitu sebesar 9,57 juta jiwa[6] (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dikatakan mengalami peningkatan. Munculnya pandemi Covid-19 di tahun 2020 melumpuhkan berbagai sektor kehidupan dunia terkhusus bidang ekonomi dan kesehatan. Akibatnya penduduk miskin meningkat ekstrem sebesar 1,3 juta orang dan pada bulan September 2021 kemiskinan ekstrem mencapai 3,73% penduduk di Indonesia [7].

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang tidak luput dari masalah kemiskinan. Secara umum dapat diketahui tingkat kemiskinan di DIY cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Jika digambarkan melalui persentase, terhitung mulai September 2018 kemiskinan DIY memiliki persentase sebesar 11,81%. Kemudian pada bulan September 2019 mengalami penurunan kemiskinan sebesar 11,44%. Di tahun 2020 dimana pada tahun tersebut terjadi wabah Virus Covid-19, persentase kemiskinan DIY mengalami kenaikan menjadi 12,80%. Sempat mereda di tahun 2021, persentase kemiskinan turun menjadi 11,91%. Pada akhir tahun 2022, persentase kemiskinan menurun menjadi 11,49% [8] Total penduduk DIY di tahun 2022 menurut jenis kelamin yaitu sebesar 4.021.816 orang dimana jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta sampai pada September 2022 mencapai total 463.63 ribu orang dengan persentase sebesar 11,49%. [9]. Profil garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp 521.673,00/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan yaitu sebesar Rp 378.902,00 atau 72,63% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 142.770,00 atau 27,37% [8]. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap makanan pokok di D.I. Yogyakarta cukup besar.

Jumlah penduduk miskin tertinggi menyoroti salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah di D.I. Yogyakarta yang memiliki perbandingan jumlah penduduk miskin terbanyak daripada Kabupaten/Kota di wilayah DIY lainnya. Dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bantul masih terdapat sekitar 12,27% atau 130.130 jiwa yang termasuk

kategori miskin dimana terbanyak dipegang oleh Kapanewon Imogiri yaitu sebesar 14.529 jiwa [10]

Kebijakan dalam hal ini berperan penting dalam menanggulangi masalah. Kebijakan publik sebagai langkah tindakan yang disengaja berkenaan dengan persoalan atau masalah tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor[11]. Kebijakan publik didefinisikan sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” yang berarti segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan[12]. Pemerintah terlibat dalam seluruh proses pembuatan kebijakan publik dalam beberapa cara [13]. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan langkah-langkah guna menekan angka kemiskinan. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, salah satunya dengan Program Beras Sejahtera (Rastra) untuk mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin. Rastra bermigrasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setelah terjadi kesepakatan rapat terbatas antara Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Keuangan Inklusif tanggal 16 Maret 2016[14]. Dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas, maka pada tahun 2020 pemerintah mengembangkan program BPNT menjadi program Sembako dengan pelaksanaannya sesuai dengan Buku Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020[15]. Dengan demikian, program Sembako di tahun 2020 merupakan keberlanjutan dari program Raskin, Rastra, dan BPNT sebelumnya.

Pengembangan transformasi BPNT menjadi program Sembako merupakan wujud pemerintah dalam upaya penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Transformasi ini diharapkan mampu mencapai prinsip 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi [16]. Mekanisme penyaluran Sembako adalah dengan mencairkan uang menggunakan teknologi *e-voucher* kepada masyarakat yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM)[17]. *E-voucher* ini dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hanya dapat diakses di tempat yang telah bekerjasama dengan bank Himpunan Negara (Himbara) dengan penerimaan dana sebesar Rp 200.000/KPM. Para KPM ini hanya dapat mengambil bantuan dalam bentuk pangan[18].

Pelaksanaan program Sembako diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako[19]. Program Sembako menysasar keseluruhan wilayah Yogyakarta dimana salah satunya adalah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul sendiri memiliki 17 Kapanewon dengan 75 Kalurahan. Kabupaten Bantul telah melaksanakan program Sembako sejak tahun 2018 dengan menggunakan mesin *electronic data capture* sebagai sarana penyaluran. Dalam mekanisme penyalurannya, tidak sedikit mendapat respon kecut seperti aturan Kementerian Sosial pada 18 Februari 2022 mengenai program Sembako yang beralih ke uang tunai melalui PT. Pos dinilai terlalu mendadak, pendataan KPM yang hilang atau ganda, dan *e-warong* yang beroperasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023 penyaluran program Sembako dimulai pada bulan Maret yang berbentuk tunai dengan transaksi yang dapat dilakukan melalui agen *e-warong*,

Bank Himbara, maupun Kantor Pos yang dapat ditarik melalui ATM para KPM. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari maraknya penyimpangan sekaligus memberi kebebasan bagi para penerimanya.

Beberapa penelitian relevan terhadap penelitian ini adalah *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rohana Tiara dan Mardianto pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas mengenai tingkat efektivitas program BPNT di Kota Palembang menggunakan pendekatan deskriptif dan campuran. Dengan menggunakan teori Duncan yang dikutip oleh Steers, ditemukan bahwa tingkat efektivitas BPNT di Kota Palembang sebesar 34,75%. Angka ini menunjukkan bahwa program BPNT telah berjalan cukup efektif[20]. *Kedua*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Iwan Hermawan, Izzaty, dan kawan-kawan pada tahun 2021. Penelitian tersebut membahas mengenai efektivitas program BPNT di Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder. Dengan menggunakan pendekatan *Importance-Performance Analysis* (IPA) ditemukan bahwa pelaksanaan BPNT telah berjalan efektif walaupun terdapat beberapa catatan untuk membuat pelaksanaan BPNT lebih optimal[21].

Pada beberapa wilayah di Kabupaten Bantul salah satunya ada di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri, program Sembako menuai beberapa permasalahan. Berdasarkan SK DTKS Kemensos Nomor 42 Tahun 2023, Kalurahan Selopamioro merupakan salah satu kelurahan yang menjadi sasaran program Sembako di Kabupaten Bantul dimana kemiskinan di Kalurahan [22]Selopamioro menempati posisi paling tinggi se-Kapanewon Imogiri yaitu sebesar 69% jiwa dari total penduduk 16.808. Pada tahun 2022, terdapat lima lansia dari Padukuhan Pelemantung Selopamioro yang berhenti mendapatkan Program Sembako maupun PKH selama setahun. Berhentinya bantuan yang mereka terima diduga karena mereka tidak memiliki pendamping. Dari lima lansia tersebut salah satunya bernama Saminem yang berumur 84 tahun. Setelah di cek di Kalurahan oleh anaknya, nama Saminem tidak lagi tercatat sebagai penerima program Sembako maupun PKH. Belum diketahui penyebab pasti alasan masalah tersebut. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi sejumlah lansia di Kalurahan Selopamioro[23]. Selain hilangnya data penerima, permasalahan timbul seperti pin terblokir, kartu hilang, kartu rusak, dan lupa pin. Kemiskinan berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat berupa pemenuhan gizi masyarakat terutama pada masyarakat miskin yang berakibat pada masalah *stunting* pada anak. Dari sekian banyak wilayah di Bantul, angka *stunting* tertinggi dipegang oleh Kalurahan Selopamioro yaitu sebesar 21 % dari total jumlah penduduk yang ada dimana angka ini menempati angka tertinggi dibandingkan dengan 75 kalurahan lainnya yang ada di Bantul dengan rerata 14 % [24].

Banyaknya permasalahan program Sembako membuat peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas program Sembako mampu tercapai. Efektivitas adalah akhir dari produk berupa kegiatan operasi yang sudah mencapai tujuan, ditinjau dari hasil kerja, kuantitas hasil kerja, dan batas waktu yang telah ditargetkan[25]. Efektivitas merupakan gambaran tingkat capaian hasil program berdasarkan target yang telah ditetapkan[26]. Efektivitas dapat dinilai melalui ukuran sejauh mana sebuah organisasi mampu mencapai tujuan yang layak[27]. Hal

ini berarti proses pengukuran untuk menentukan efektivitas dapat dilakukan melalui beberapa indikator tertentu. Pengukuran menggunakan indikator-indikator teori efektivitas yaitu pemahman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata[28].

Berdasarkan program Sembako dan masalah yang telah dijelaskan, perlu dilakukan peninjauan terkait pelaksanaan program Sembako yang ada di Kalurahan Selopamioro untuk mencapai kesuksesan, keefektivan pelaksanaan Sembako bagi masyarakat, dan mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dalam meneruskan estafet pembangunan[29]. Dengan demikian, penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul "Efektivitas Program Sembako di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang mempelajari kondisi objek alamiah dengan posisi peneliti sebagai objek kunci. Hasil dari penelitian kualitatif berupa data yang mendalam atau mengandung makna daripada generalisasi. Hal ini disebabkan karena sifat analisis data yang induktif[30]. Selanjutnya, penelitian kualitatif dipergunakan untuk memberikan gambaran kualitas dari pengaruh sosial dan tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif[31]. Pemilihan metode kualitatif dimaksudkan agar penulis memperoleh keterangan, sumber dan data faktual secara mendalam terhadap deskripsi dan hambatan program Sembako di Kalurahan Selopamioro. Lokasi ini dipilih karena antara permasalahan dengan indikator yang dipilih oleh peneliti relevan untuk dikaji. Waktu penelitian berlangsung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024. Subjek penelitian ini adalah Pelaksana Harian, Tenaga IT, dan Analis Komponen Data Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Imogiri, Tata Laksana Pemerintah Kalurahan Selopamioro, agen *e-waroeang*, dan Keluarga Penerima Manfaat program Sembako di Kalurahan Selopamioro.

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data dengan menggabungkan data sekunder melalui studi pustaka, dokumen, arsip-arsip, dan gambar. Teknik keabsahan data digunakan sebagai pembanding antar jawaban informan seperti dari Dinas Sosial, TKS Kapanewon Imogiri, Pemerintah Kalurahan Selopamioro, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako di Kalurahan Selopamioro. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Program Sembako merupakan program bantuan sosial yang digulirkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berbentuk bantuan pangan dengan menggunakan fitur uang elektronik sebagai media penyalurannya. Berdasarkan masalah yang ada di Kalurahan Selopamioro terkait program Sembako, maka

peneliti akan menggunakan analisis indikator efektivitas dari Sutrisno (2010), yang terdiri dari lima indikator, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan yang nyata. Indikator dari Sutrisno terpilih dalam penelitian ini karena indikator tersebut relevan dengan tujuan dari program Sembako.

3.1 Pemahaman Program

Pemahaman program Sembako berkaitan dengan pemahaman warga Kalurahan Selopamioro mengenai tujuan dan sasaran program. Apabila dianalisis menggunakan indikator efektivitas, pemahaman program Sembako di Kalurahan Selopamioro sangat minim. Pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Sosial hanya memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dan TKSK melalui regulasi dan peraturan. Masyarakat khususnya Kalurahan Selopamioro hanya diberitahu pada saat penerima Sembako menerima KKS saja. Tidak ada sosialisasi lanjutan yang diberikan setelah itu.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat beberapa KPM di Kalurahan Selopamioro yang bingung ketika ditanya mengenai program Sembako. Mereka hanya tahu bahwa program Sembako adalah bantuan yang berwujud uang yang bisa dibelanjakan sesuka hati. Ketika ditanya terkait penyaluran, tujuan, manfaat, dan peruntukan program Sembako program Sembako sendiri, para KPM masih sangat kebingungan terlebih kepada para lansia. Agen *e-waroeng* yang ada di Kalurahan Selopamioro merasa bahwa banyak para KPM yang bertanya kepada agen terkait kepesertaan sembako padahal hal itu bukan tugas agen. Tugas agen hanya mencairkan dana yang sudah ada di kartu masing-masing KPS. Sementara itu, para pemangku kepentingan seperti TKSK dan PLH Dinas Sosial Bantul menjawab cukup lengkap terkait dengan penyaluran, tujuan, manfaat, peruntukan program dan hal-hal yang berkaitan dengan program Sembako.

Kemudian terkait pemahaman program KPM Kalurahan Selopamioro terhadap pembelanjaan program Sembako. Transformasi BPNT menjadi program Sembako terhadap pembelanjaannya tidak boleh dipaketkan. Agen tidak boleh untuk mematok paketan Sembako sehingga KPM bebas memilih belanja apapun asalkan sesuai dengan nilai bantuan perbulannya. Informasi terkait hal ini bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Ketika ditanyakan kepada agen dan para KPM ternyata mereka juga kurang mengerti terkait dengan aturan ini. Sementara itu, para KPM di Kalurahan Selopamioro kebanyakan memilih untuk mencairkan program Sembako di agen-agen terdekat. Jarang sekali mereka mencairkan Sembako melalui Bank atau Kantor Pos. Hal ini membuat perbaikan kebijakan transformasi BPNT menjadi program Sembako dinilai kurang efektif jika diterapkan di Kalurahan Selopamioro.

Dengan demikian, adalah tidak adanya sosialisasi lagi secara *continue* mengenai program Sembako. Pemerintah Kalurahan bahkan tidak mendapatkan sosialisasi secara mendalam dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, hanya mendapatkan informasi secara general bahwa program Sembako itu ada. Terdapat sosialisasi yang tidak dilakukan secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan yang berwenang ditingkat desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman program cukup efektif karena telah sesuai dengan arahan pusat.

Walaupun sejatinya tidak ada sosialisasi secara *continue* dan menyeluruh kepada KPM dan agen yang beroperasi.

3.2 Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran program berarti sejauh mana program dapat berjalan. Sasaran program Sembako di Kalurahan Selopamioro ini adalah para warga miskin yang terdata dalam DTKS dan aplikasi SIKS-NG yang telah dimutakhirkan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS). Pemerintah Kabupaten Bantul merasa bahwa DTKS tidak valid sehingga Kabupaten Bantul memprakarsai IKS. IKS merupakan lembar Indikator Kesejahteraan Sosial yang diprakarsai oleh Kabupaten Bantul di tahun 2020 untuk memastikan bahwa data-data keluarga miskin telah valid.

Apabila dilihat dari segi ketepatan sasaran terhadap warga miskin yang terdata dalam SIKS-NG yang diolah oleh Kementerian Sosial, maka dapat dinilai bahwa program Sembako secara tepat menysasar para KPM. Setiap bulan, Kementerian Sosial mengeluarkan SK yang berisi siapa saja para KPM yang berhak menerima program Sembako. Kementerian Sosial juga berhak menghapuskan atau meniadaklayakan mana saja warga yang tidak menjadi penerima Sembako lagi karena dirasa sudah menjadi keluarga yang mampu. Kementerian Sosial juga berhak menambahkan data baru yang berasal dari pengaduan-pengaduan maupun warga yang pada bulan tersebut dikategorikan miskin dan layak menerima program Sembako.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa KPM di Kalurahan Selopamioro yang belum mentransaksikan saldo untuk dibelanjakan sehingga kemungkinan saldo dapat hangus jika KPM lupa untuk mencairkannya. Selain itu, pemerintah pusat telah memprioritaskan para penyandang disabilitas menjadi sasaran penerima program Sembako. Bagi penerima disabilitas di Kalurahan Selopamioro tidak memandang kaya maupun miskin sehingga seluruh penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan program Sembako. Pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan harian terlebih kepada para penyandang disabilitas agar kualitas hidupnya terjamin.

Disisi lain, terdapat pertentangan terkait dengan penerimaan program Sembako di Kalurahan Selopamioro yang tidak sesuai dengan fakta kemampuan ekonomi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh kesaksian agen dan beberapa warga di Kalurahan Selopamioro bahwa saat ini masih banyak penerima yang tergolong mampu tetapi mendapatkan program Sembako. Warga Kalurahan Selopamioro adalah warga yang peka terhadap lingkungan sosial sehingga kadang mereka merasa heran mengapa para penerima Sembako ini adalah orang yang dalam segi mampu untuk mencukupi kehidupan ekonominya. Hal tersebut kemudian menimbulkan keirian yang berakhir pada kecemburuan sosial pada masyarakat. Masyarakat merasa bahwa pemerintah kurang adil dalam pembagian bantuan.

Dengan demikian, Program Sembako di Kalurahan Selopamioro telah tepat sasaran jika ditunjukkan kepada Pemerintah Daerah maupun Pusat. Tepat sasaran disini dalam artian sudah sesuai dengan data-data IKS, SIKS-NG dan DTKS yaitu warga dengan kategori miskin serta warga penyandang disabilitas. Berdasarkan data wawancara, disisi lain terdapat pertentangan mengenai penerima yang tidak

sesuai dengan fakta lapangan, dimana sembako diterima oleh warga yang keadaan ekonominya mampu dan layak. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan sasaran di Kalurahan Selopamiro telah tercapai walaupun terdapat beberapa diantara penerima Sembako yang tidak sesuai kriteria atas fakta dilapangan.

3.3 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang dapat dilihat dari penggunaan waktu untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Berdasarkan temuan dilapangan, apabila dilihat dari segi ketepatan waktu, pada saat BPNT dijalankan, para KPM di Kalurahan Selopamiro menerima dana rutin setiap bulan, paling lambat tanggal sepuluh bulan berjalan. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis dari Buku Pedoman Sembako. Adanya transformasi program Sembako menuai kontra dikalangan masyarakat terkait dengan waktu pencairan. KPM yang awalnya menerima bantuan setiap bulan sekali kini tidak dapat diprediksi waktu kapan cairnya. Terkadang pemerintah pusat mengucurkan dana program Sembako setiap dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Hal ini membuat masyarakat tidak dapat menentukan waktu kapan bantuan akan turun kepadanya.

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa program Sembako menjadi tidak dapat diprediksi dan ditentukan kapan waktu cairnya. Tidak ada informasi apapun terkait waktu pencairan ini baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah daerah seperti Dinas Sosial Kabupaten Bantul hanya dapat menunggu SK program Sembako yang turun dari pusat untuk ditindaklanjuti. Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga tidak dapat mengintervensi Kementerian Sosial terkait waktu bantuan turun. Ketika dana turun dan KPM tidak segera untuk mengambilnya, maka terdapat tanggal kadaluarsa yang menunjukkan bahwa dana sudah tidak berlaku lagi. Bank membekukan dana yang tidak kunjung ditarik selama tiga bulan atau kurang lebih 100 hari setelah dana masuk ke rekening.

Ketidaktepatan waktu menjadi faktor penghambat bagi masyarakat yang semula memperoleh kebutuhan pangan rutin setiap bulan kemudian menjadi tidak bisa diperkirakan cairnya. Sisi positifnya adalah, alur penyaluran program Sembako di Kalurahan Selopamiro menjadi lebih cepat dan ringkas dari tahun-tahun sebelumnya karena sudah memadukan transaksi nontunai ke tunai melalui KKS. Biarpun demikian SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sudah pasti turun walaupun turunnya setiap dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Dengan demikian, pencairan dana program Sembako di Kalurahan Selopamiro sudah tepat waktu. Namun, tidak ada patokan tanggal terkait dana yang kapan dana akan turun. Kondisi ini membuat dana yang masuk menjadi tidak dapat diprediksi. Walaupun sebenarnya waktu yang digunakan KPM untuk mentransaksikan bantuan dana Sembako menjadi lebih ringkas, cepat, dan efisien.

3.4 Tercapainya Tujuan

Ketercapaian tujuan berarti seluruh upaya dalam usaha telah memenuhi target yang diharapkan. Ketercapaian tujuan merupakan ukuran untuk menentukan pencapaian tujuan dari suatu program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

program Sembako memang dibutuhkan oleh masyarakat miskin karena memang membantu untuk mendukung kesejahteraan kehidupan mereka. Sesuai dengan Buku Pedoman Sembako dan peraturan pemerintah, terdapat empat tujuan dari program Sembako yaitu salah satunya ialah mengurangi beban KPM dalam hal pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

Berdasarkan temuan dilapangan, program Sembako di Kalurahan Selopamioro telah mampu meringankan beban KPM dalam pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari. Namun, disisi lain sesuai dengan pernyataan TKSK Kapanewon Imogiri yang telah melihat fakta nyata dilapangan mengemukakan bahwa para penerima bantuan terutama Sembako secara tunai secara tidak sadar mendidik para KPM menjadi seorang pengemis. Para KPM semakin mengenakan dirinya karena mereka merasa tidak perlu bekerja saja sudah bisa mendapatkan bantuan uang dari pemerintah. Hal ini dapat dimaknakan bahwa sebenarnya keinginan pemerintah itu baik namun praktek dilapangan belum tentu baik.

Tujuan lain dari program Sembako sendiri adalah memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan waktu, sasaran, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, serta memberi pilihan KPM memenuhi kebutuhan pangan. Pencairan dana program Sembako yang berbentuk tunai tidak selalu dibelanjakan sesuai peruntukannya. Pencairan yang menggunakan sistem tunai tidak menjamin bahwa pembelanjanya sesuai dengan peruntukan. Para KPM bisa saja membelikan bahan kebutuhan non pangan lainnya karena tidak ada pengawasan sama sekali saat program Sembako terimplementasi.

Dari beberapa penjelasan diatas sebenarnya program Sembako telah berhasil mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kalurahan Selopamioro. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial membagikan bantuan sembako sebagai langkah dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Program Sembako telah dinilai mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari program Sembako sudah tercapai walaupun terdapat catatan yang menyertainya seperti adanya peralihan pencairan nontunai menjadi tunai memberikan celah kepada KPM untuk melakukan pembelanjaan-pembelanjaan diluar peruntukan.

3.5 Perubahan Nyata

Perubahan nyata digunakan untuk mengukur sejauh mana kehadiran program Sembako memberikan dampak kepada masyarakat sasaran yaitu pada KPM Kalurahan Selopamioro. Terdapat perubahan nyata para KPM di Kalurahan Selopamioro setelah menerima subsidi program Sembako. Pertama, warga penerima Sembako di Kalurahan Selopamioro mampu mencukupi kebutuhan pangannya sehingga ketahanan pangan dapat dikatakan meningkat. Kebanyakan, mereka para KPM yang dulunya tidak bisa makan dengan teratur tiga kali sehari sejak adanya program Sembako akhirnya bisa makan secara rutin. Kesaksian menarik muncul ketika PLH program Sembako Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa para KPM merasa kehilangan ketika mereka sudah tidak lagi menjadi penerima program Sembako. Bahkan terdapat beberapa pengaduan terkait

kenapa bantuan program Sembako tidak turun lagi. Secara tidak langsung hal ini menginterpretasikan bahwa program Sembako sangat dirasakan kehadirannya.

Kedua, kualitas gizi di Kalurahan Selopamioro terpenuhi. Bagi para KPM, pemenuhan gizi yang baik mampu menunjang semangat kerja. Bahan pangan yang dimakan dari hasil program Sembako menjadi lebih berkualitas sehingga mereka merasa menjadi lebih siap menghadapi hari-hari. Dengan demikian, indikator perubahan nyata dalam program Sembako tercapai. Hal ini terbukti bahwa banyak kesaksian para KPM dan *stakeholder* bahwa banyak hikmah positif yang dapat diambil dari program Sembako.

3.5 Faktor Penghambat Program Sembako

Program Sembako menjadi suatu program yang tidak luput dari hambatan-hambatan yang menjadi kerikil penghalang keefektifan program Sembako. Adapun hambatan-hambatan dalam penyaluran program, antara lain:

- a. Agen *e-waroeng* yang memiliki maksud terselubung memotong nilai bantuan yang tidak sesuai aturan
- b. Masalah monitoring pembelanjaan yang kurang
- c. Kurangnya informasi dilapangan saat KPM mengalami permasalahan pencairan yang dimungkinkan dari penerima KPM yang sudah lanjut usia.
- d. Pengaduan para agen dan para KPM yang tidak terespons secara cepat, seperti halnya pin terblokir, kartu hilang, kartu rusak, lupa pin dan kepesertaan yang sudah tidak terdaftar lagi, ketidakpastian kriteria, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi lembaga-lembaga terkait untuk kemudian ditindak lanjut dan dicarikan solusi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil data penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut, sebagai berikut:

- a. Program Sembako yang ada di Kalurahan Selopamioro telah berjalan efektif dengan berbagai catatan yang menyertainya. Pengukuran diindikasikan pada indikator efektivitas Sutrisno terdiri dari pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.
- b. Pertama, catatan mengenai indikator pemahaman program yaitu tidak ada sosialisasi secara menyeluruh dan *continue* dari pusat kepada pemerintah Kalurahan Selopamioro dan para KPM Sembako. Kedua, indikator ketepatan sasaran, yaitu terdapat penerima yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, dimana sembako diterima oleh warga yang keadaan ekonominya mampu dan layak. Ketiga, indikator ketepatan waktu, yaitu waktu pencairan dana program Sembako tidak dapat diprediksi. Keempat, ketercapaian tujuan dimana peralihan pencairan nontunai menjadi tunai memberikan celah kepada KPM untuk melakukan pembelanjaan-pembelanjaan diluar peruntukan.
- c. Faktor-faktor penghambat efektivitas program Sembako seperti halnya agen *e-waroeng* yang memiliki maksud terselubung memotong nilai bantuan tidak sesuai aturan. Kemudian masalah *monitoring* pembelanjaan yang

kurang, kurangnya informasi dilapangan saat KPM mengalami permasalahan pencairan yang dimungkinkan dari penerima KPM yang sudah lanjut usia dan pengaduan para agen serta para KPM yang tidak terespons secara cepat, seperti halnya pin terblokir, kartu hilang, kartu rusak, lupa pin dan informasi penghapusan kepesertaan program Sembako yang sudah tidak terdaftar lagi.

Referensi

- [1] Y. Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,” *Jurnal EKSOS*, vol. 8, no. 3, pp. 176–185, 2012.
- [2] F. N. , et. al Robati, “Poverty Modelling in The Islamic Republic of Iran Using an ANFIS Optimized Network with The Differential Evolution Algorithm (ANFIS_DE),” *MethodsX*, vol. 7, pp. 1–15, 2020.
- [3] World Bank, “Poverty and Shared Prosperity 2018 : Piecing Together The Poverty Puzzle,” World Bank Group.
- [4] A. A. , D. M. , Irsad. , & R. D. Tanjung, “The impact of monetary and fiscal policy on poverty in Indonesia,” *Journal of Applied Economic Sciences*, vol. 14, no. 4, pp. 1068–1073, 2019, doi: 10.14505/jaes.v14.4(66).12.
- [5] B. , & S. M. Sumargo, “Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 19, no. 2, pp. 160–172, Jul. 2019, doi: 10.21002/jepi.2019.10.
- [6] Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022,” 2023. Accessed: Jun. 10, 2023. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- [7] Tim Kementerian PPN/Bappenas, “Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah,” 2023. Accessed: Jun. 10, 2023. [Online]. Available: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dit%20Evaluasi%2C%20dan%20Pengendalian%20Penyusunan%20Perencanaan%20Pembangunan/Ringkasan%20RKP%202023.pdf
- [8] Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, “Berita Resmi Statistik,” Yogyakarta, Jan. 2023. Accessed: Jun. 22, 2023. [Online]. Available: <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1351/profil-kemiskinan-d-i-yogyakarta-september-2022.html>
- [9] Bappeda Provinsi DIY, “Kemiskinan Data Vertikal Badan Pusat Statistik,” Master Data Bappeda Provinsi DIY. Accessed: Jun. 22, 2023. [Online]. Available: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/383-kemiskinan?id_skpd=29
- [10] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul 2022,” Yogyakarta, Jan. 2023. Accessed: Jun. 22, 2023. [Online]. Available: <https://bantulkab.bps.go.id/publication/2023/02/17/75b5baa059ab4ee7c05fde7a/booklet-kemiskinan-kabupaten-bantul-2022.html>
- [11] J. E. Anderson, *Policymaking : An Introduction*, 4th ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.
- [12] T. R. Dye, *Understanding Public Policy*, Edisi Kesebelas. New Jersey: Perason Prentice Hall, 2005.
- [13] L. N. Gerston, *Public Policy Making in a Democratic Society*. Armonk: M.E. Sharpe, 2002.

- [14] Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020*. Jakarta Pusat: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, 2020.
- [15] Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020,” Dec. 2019.
- [16] A. C. , S. T. , & C. J. Nainggolan, “Implementation of Sembako Program,” *Jurnal Governansi*, vol. 8, no. 1, pp. 39–48, 2022.
- [17] Nuraeni S, Rachmawati Ike, and Nur Tuah, “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi,” *Jurnal Professional*, vol. 9, no. 1, pp. 143–148, 2022.
- [18] Ilosa A, Zalhaida, and Nurjana Mike, “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,” *ndonesian Journal of Business Economics and Management* , vol. 1, no. 2, pp. 19–26, 2022, [Online]. Available: <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem>
- [19] S. Nurkhaini, S. Nurman, Hasrul, and J. Indrawadi, “Implementasi program sembako di desa,” *Journal of Education, Cultural and Politics*, vol. 3, no. 1, pp. 82–88, 2023.
- [20] Tiara & Mardiyanto, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang,” *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, vol. 3, no. 1, pp. 36–44, 2019.
- [21] I. Hermawan, I. Izzaty, B. R. Sari, and Sudarwati, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 2, pp. 131–145, 2021.
- [22] Kementerian Sosial, *SK DTKS Kemensos Nomor 42 Tahun 2023*. 2023.
- [23] Ivan, “Sejumlah Lansia Selopamioro Tidak Bisa Cairkan Bantuan.” Accessed: Jun. 23, 2023. [Online]. Available: <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/241015/sejumlah-lansia-selopamioro-tidak-bisa-cairkan-bantuan>
- [24] Radarjogja, “Masyarakat Hidup Miskin Jadi Penyebab Stunting.” Accessed: Jun. 23, 2023. [Online]. Available: <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/65764552/masyarakat-hidup-miskin-jadi-penyebab-stunting>
- [25] V. S. E. Cicilia, S. Murni, and D. Engka, “Analisis Efisiensi dan Efektivitas serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, vol. 17, no. 2, 2015, doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.10245.17.2.2015>.
- [26] M. Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- [27] R. M. Steers, *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku*. Jakarta: Erlangga, 2020.
- [28] E. Sutrisno, *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- [29] Kementerian PPN/Bappenas, *Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
- [30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [31] Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta, 2010.